****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/III/2024

TENTANG

SK PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA SATGAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada satuan kerja Pengadilan Agama se-Wilayah Sumatera Barat, dipandang perlu membentuk kelompok kerja;

b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Intansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
9. Notula rapat Surat Ketua Kelompok Kerja Satgas SAKIP Tahun   
   2023 Nomor: 1000/PAN.PTA.W3-A/OT1.6/III/2024 pada pada   
   Senin 4 Maret 2024.

Dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 0179/KPTA.W3-A/0T1.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Satgas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Satgas Sistem Akuntabilias

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satgas bertugas:

1. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja di lingkungan masing-masing tentang penyusunan SAKIP;
2. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat;
3. Mengevaluasi SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat melalui aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabititas Kinerja (SEMAR) dan berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Membuat Lembar Kerja Evaluasi masing-masing SAKIP satuan kerja;
5. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 5 Maret 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/III/2024

TANGGAL: 5 Maret 2024

KELOMPOK KERJA SATGAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Wakil Ketua | : | Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Kelompok Kerja I | : | 1. Mukhlis, S.H. 2. Berki Rahmat, S. Kom. 3. Arya Jaya Shentika, S.H. |
| Kelompok Kerja II | : | 1. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. |
|  |  | 1. Riccelia Junifa, S.E. 2. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B |
| Kelompok Kerja III | : | 1. Aidil Akbar, S.E. 2. Mursyidah, S.AP. 3. Novia Mayasari, S.E. 4. Nella Agustri, S.E. |
| Kelompok Kerja IV | : | 1. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. |
|  |  | 1. Yasirli Amri, S.Kom 2. Yova Nelindy A.Md. 3. Efri Sukma |
| Kelompok Kerja V | : | 1. Elvi Yunita, S.H., M.H. 2. Elsa Rusdiana, S.E. 3. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B |
| Kelompok Kerja VI | : | 1. Rifka Hidayat, S.H., M.M. |
|  |  | 1. Dra. Syuryati 2. Nurfadilla, S.I.P. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/III/2024

TANGGAL: 5 Maret 2024

PEMBAGIAN WILAYAH EVALUASI KELOMPOK KERJA SATGAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KELOMPOK KERJA | WILAYAH EVALUASI |
| 1 | Kelompok Kerja I | Pengadilan Agama Padang  Pengadilan Agama Batusangkar  Pengadilan Agama Lubuk Sikaping |
| 2 | Kelompok Kerja II | Pengadilan Agama Tanjung Pati  Pengadilan Agama Maninjau  Pengadilan Agama Payakumbuh |
| 3 | Kelompok Kerja III | Pengadilan Agama Talu  Pengadilan Agama Muara Labuh  Pengadilan Agama Sawahlunto |
| 4 | Kelompok Kerja IV | Pengadilan Agama Koto Baru  Pengadilan Agama Solok  Pengadilan Agama Sijunjung |
| 5 | Kelompok Kerja V | Pengadilan Agama Pariaman  Pengadilan Agama Bukittinggi  Pengadilan Agama Padang Panjang |
| 6 | Kelompok Kerja VI | Pengadilan Agama Painan  Pengadilan Agama Pulau Punjung  Pengadilan Agama Lubuk Basung |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN